

RENCANA KERJA (RENJA)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BOGOR

TAHUN 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan KPU pada Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya, dengan landasan untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Tahun 2015 merupakan saat terbaik untuk lebih memaksimalkan kinerja dan melakukan pemeliharaan data pasca penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

Sesuai dengan dinamika perkembangan politik yang terjadi saat ini dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah, dimana terdapat tuntutan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menjadi dasar dalam upaya pembenahan perencanaan dibidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun, yang disusun berpedoman pada tugas dan fungsi KPU Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan pagu anggaran mengacu pada prioritas sasaran program tahun anggaran 2015, sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan dan anggaran yang baru.

Rencana Kerja KPU Kota Bogor tahun 2015 ini mengacu pada Visi dan Misi KPU serta dipadukan dengan Visi dan Misi KPU Kota Bogor. Rencana Kerja KPU Kota Bogor ini berisikan penjabaran Program Dukungan Manajemen dan Bisnis Lainnya.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 Ayat 1
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pasal 9 ayat 1

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk melakukan perencanaan program dan kegiatan KPU Kota Bogor pada Tahun 2015, kemudian akan diajukan ke tingkat Provinsi dan KPU RI sebagai bahan penyusunan RKAKL Tahun 2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ini ke dalam RKA-K/LKPU RI dan DIPA-K/L KPU RI.

D. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja KPU Kota Bogor Tahun 2015 meliputi:

- | | | |
|---------|---|-------------------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | KONDISI UMUM |
| BAB III | : | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB IV | : | PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN |
| BAB V | : | PENUTUP |

BAB II

KONDISI UMUM

A. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Aspek Demografi.

Penyebaran penduduk secara umum tidak merata. Hal ini terlihat pada perbedaan kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan se-Kota Bogor yang tidak sama. Di Kecamatan yang memiliki potensi di bidang ekonominya cukup tinggi terutama pada wilayah yang dikembangkan sebagai daerah Perdagangan dan Jasa, tingkat laju kepadatan penduduknya relatif lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wilayah permukiman. Untuk wilayah yang tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi menjadi sasaran KPU Kota Bogor dalam perencanaan sosialisasi Pemilu, sehingga diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat semakin meningkat, meskipun anggaran untuk kegiatan ini belum sepenuhnya mendukung.

2) Aspek Ideologi

Pandangan hidup dan azas bernegara berbangsa dan bermasyarakat secara umum di Kota Bogor sejak dahulu hingga sekarang tidak berubah, hal ini dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

- a) Kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama telah menunjukkan hal hal yang menggembirakan semua pihak serta dapat meminimalisir isu SARA yang pada akhirnya dapat memantapkan stabilitas wilayah.
- b) Secara umum kondisi ketahanan nasional dibidang ideologi yang dimiliki masyarakat Kota Bogor dalam kualifikasi yang cukup baik, heterogenitas masyarakat Kota Bogor tidak pernah menimbulkan konflik ataupun kasus SARA, hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap falsafah Pancasila.

3) Aspek Politik

Aspirasi dan tuntutan wajar yang secara terbuka maupun tertutup yang berkembang di masyarakat disalurkan oleh lembaga-lembaga infrastruktur yang mampu menampung dan menyalurkan kepada pihak-pihak pengambil keputusan. Hal ini diperkuat dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi

dan lembaga infrastruktur baik profesi fungsi maupun swadaya masyarakat yang makin subur.

Kondisi perpolitikan yang baik dan dinamis diupayakan diciptakan, dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Peranan Pemerintah Kota Bogor banyak memberikan pengaruh positif terutama untuk kehidupan politik yang lebih berkembang, namun tetap kreatif dan dinamis dalam mengantisipasi kemajuan pembangunan.

4) Aspek Sosial dan Budaya

- a) Kondisi ketahanan di bidang sosial budaya dapat dikatakan baik
- b) Tingkat keharmonisan yang tinggi dalam masyarakat yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku, budaya atau adat istiadat.
- c) Tingkat perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik sehingga mendukung stabilitas wilayah.
- d) Budaya masyarakat cenderung terkontaminasi oleh budaya asing sehingga rawan terhadap kepunahan budaya lokal.

B. Analisis Situasi

Model yang paling populer untuk analisa situasi adalah analisa SWOT, yang ditentukan oleh kombinasi faktor lingkungan internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT, SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal yaitu *Strengths* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) serta lingkungan eksternal yaitu *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) :

1. Analisis Lingkungan Internal.

❖ **Kekuatan-kekuatan**

- a. Komisioner KPU Kota Bogor sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang anggota.
- b. Personil Sekretariat KPU Kota Bogor sebanyak 35 orang, terdiri dari 1 orang sekretaris (gol.IV.a), 4 orang Kasubag (gol. III b satu 1 dan Golongan III d 3 orang), pelaksana (III/d) sebanyak 1 orang, pelaksana (III/a) sebanyak 10 orang, pelaksana (gol.II) sebanyak 9 orang, tenaga IT (honor) 1 orang, Supir (honor) 1 orang pramubakti (honor) 1 orang, Satpam (honor) sebanyak 3 orang dan tenaga pendukung (kontrak) 4 orang.

- c. Lokasi yang strategis, sehingga mudah ditemukan
- d. Proses data menggunakan komputer.

❖ **Kelemahan-Kelemahan**

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih relatif terbatas dan masih dipengaruhi kultur birokrasi yang bersifat pasif, antara lain kurang disiplin waktu dan disiplin kerja, kurang terampil dalam pengoperasian komputer, kurangnya tingkat pengetahuan tentang Tupoksi KPU.
- b. SDM yang memiliki pengetahuan komunikasi dan pengelolaan informasi dan kearsipan belum maksimal sehingga file kearsipan kegiatan dan produk administrasi masih lemah.
- c. Para pejabat yang masih bersifat diperbantukan dari pemerintah daerah, seringkali sulit dalam pelaksanaannya, karena selain harus menunggu SK dari Pemerintah daerah juga menunggu SK dari KPU Pusat. Begitu pula dengan pelantikan, selain pelantikan oleh Walikota, juga harus dilantik Sekretaris oleh KPU Provinsi.
- d. Penyediaan fasilitas pelayanan informasi, masih belum bisa memanfaatkan keberadaan website di internet, sebagai pendukung kelancaran informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal

❖ **Peluang-peluang**

- a. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KPU Kota Bogor selama ini mendapat dukungan penuh dari KPU Pusat dan dukungan dari Pemerintah Kota Bogor dalam hal pemberian bantuan berupa Hibah dari APBD Kota Bogor.
- b. Keberadaan KPU Kota Bogor merupakan bentuk konkret penyelenggaraan pemilu yang transparan dalam melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Adanya program pelatihan dari KPU RI dan KPU Provinsi dalam upaya meningkatkan keterampilan personil melalui diklat seperti, pengadaan barang dan jasa kearsipan dan bendahara.

❖ **Tantangan-tantangan**

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai politik dan demokrasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum.

- b. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan KPU harus selalu siap melayani informasi yang diperlukan masyarakat.
- c. Media pers memandang KPU sebagai badan publik yang besar dan memiliki kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga diawasi dan dikontrol oleh media massa.

C. Identifikasi Masalah

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Bogormenghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, yaitu :

- 1. Organisasi dan personil Kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 2. Pelaksanaan sosialisasi politik dan demokrasi dari segi kualitas dan kuantitas masih terbatas.
- 3. Penempatan personil yang belum sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki.
- 4. Masih lemahnya sistem pengendalian kerja, sehingga masih ada personil yang tidak produktif dalam melaksanakan tugas.
- 5. Belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU Kota Bogor.
- 6. Sekretariat KPU Kota Bogor masih menempati gedung/kantor dengan menyewa/mengontrak kepada pihak lain setiap 2 (dua) tahun dengan biaya Hibah APBD sehingga setiap 2 (dua) tahun harus pindah kantor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi KPU

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014 yaitu “ Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:

- (1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- (2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel edukatif dan beradab;
- (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- (4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Visi dan Misi KPU Kota Bogor

a. Visi

Menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai organisasi modern yang profesional dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

b. Misi

- (1) Meningkatkan kualitas kinerja personil kesekretariatan KPU Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu.
- (2) Menjalin kerjasama dengan komponen organisasi masyarakat dan partai politik sebagai komunikasi kegiatan sosialisasi.
- (3) Mengolah data dan informasi secara menyeluruh dan akurat sehingga lebih mudah dimanfaatkan masyarakat
- (4) Mendukung kegiatan KPU Provinsi dan KPU RI.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, yaitu :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
- c. Menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, yaitu :

- a. Pengembangan kemampuan SDM sekretariat melalui pengikutsertaan personil dalam pendidikan dan pelatihan
- b. Pemberdayaan politik dan demokrasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih
- c. Penataan dokumentasi, data dan kearsipan serta perpustakaan dalam mendukung tertib administrasi dan publikasi yang efisien dan efektif

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN

A. Program dan Kegiatan

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
- c. Pembayaran gaji dan tunjangan
- d. Pengelolaan data dan pemeliharaan logistik pemilu
- e. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- f. Sarana dan Prasarana (Pengadaan Finger Print, Kendaraan Roda Dua)
- g. Penyusunan Program, Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL Tahun 2016
- h. Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA
- i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LAKIP 2014, TAPKIN 2015 dan PMK 249
- j. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
- k. Peningkatan Kompetensi SDM (Diklat-diklat)
- l. Penatausahaan Barang Milik Negara
- m. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
- n. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN
- o. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (Aplikasi Sistem Arsip Digital, Penataan Arsip, Penilaian Arsip)
- p. Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kearsipan, dan Perpustakaan
- q. Layanan Operasional Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan)
- r. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
- s. Rapat-rapat Kerja / Koordinasi / Supervisi /Konsultasi

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Advokasi dan Sengketa Hukum
- b. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

- c. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu
- d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor
- e. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Workshop/seminar, Pemilihan Ketua BEM/OSIS/RW melalui e-voting, Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pemilu dan Pemilukada)
- f. Pelayanan informasi oleh PPID/helpdesk
- g. Layanan Teknologi Informasi (Pengembangan dan pengelolaan website dan media sosial, internet dan hosting)

B. Pagu Anggaran 2014**1. Program Kegiatan yang pendanaannya diajukan melalui APBN Tahun Anggaran 2015**

a.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU		Rp.	2.740.799.000
	1.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rp.	30.000.000
	2.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp.	15.000.000
	3.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp.	1.461.299.000
	4.	Pengelolaan data dan pemeliharaan logistik pemilu		80.000.000
	5.	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	10.000.000
	6.	Sarana dan Prasarana (Pengadaan Finger Print, Kendaraan Roda Dua)	Rp.	500.000.000
	7.	Penyusunan Program, Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL Tahun 2016	Rp.	11.500.000
	8.	Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA		11.000.000
	9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LAKIP 2014, TAPKIN 2015 dan PMK 249	Rp.	12.000.000
	10.	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM		4.000.000
	11.	Peningkatan Kompetensi SDM (Diklat-diklat)	Rp.	7.000.000

	12.	Penatausahaan Barang Milik Negara	Rp.	20.000.000
	13.	Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Rp.	5.000.000
	14.	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	Rp.	3.000.000
	15.	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (Aplikasi Sistem Arsip Digital, Penataan Arsip, Penilaian Arsip)	Rp.	40.000.000
	16.	Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kearsipan, dan Perpustakaan	Rp.	15.000.000
	17.	Layanan Operasional Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan)	Rp.	500.000.000
	18.	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU	Rp.	3.000.000
	19.	Rapat-rapat Kerja / Koordinasi / Supervisi /Konsultasi	Rp.	13.000.000
b.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		Rp.	278.500.000
	1.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp.	3.000.000
	2.	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp.	3.500.000
	3.	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu	Rp.	2.000.000
	4.	Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor	Rp.	15.000.000
	5.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Workshop/seminar, Pemilihan Ketua BEM/OSIS/RW melalui e-voting, Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pemilu dan Pemilukada)	Rp.	200.000.000
	6.	Pelayanan informasi oleh PPID/helpdesk	Rp.	10.000.000
	7.	Layanan Teknologi Informasi (Pengembangan dan pengelolaan website dan media sosial, internet dan hosting)	Rp.	45.000.000

Total Anggaran 2015	Rp.	3.019.299.000
----------------------------	------------	----------------------

2. Program kegiatan penunjang khusus yang pendanaannya diajukan melalui Dana Hibah APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2015

a.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU		Rp.	300.000.000
	1.	Layanan Administrasi Perkantoran (DED Museum Pemilu dan Gedung KPU), Honor pengelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, pemeliharaan kendaraan dinas, pelayanan administrasi kepegawaian)	Rp.	300.000.000
b.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		Rp.	550.000.000
	1.	Kajian penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Rp.	150.000.000
	2.	Sosialisasi melalui Cerdas Cermat Pendidikan Pemilih Pemula untuk pelajar, Debat pemilu untuk mahasiswa dan sosialisasi implementasi e-voting	Rp.	175.000.000
	3.	Layanan Teknologi Informasi (rancang bangun aplikasi e-voting, aplikasi hasil pemilu dan aplikasi kearsipan)	Rp.	225.000.000
Total Anggaran 2015			Rp.	850.000.000

C. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran = Pagu APBN + Pagu APBD

$$= \text{Rp. } 3.019.299.000 + \text{Rp. } 850.000.000 \\ = \text{Rp. } 3.869.299.000$$

Total Pagu Anggaran yang berasal dari APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2015 sejumlah **Rp. 3.869.299.000. (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun anggaran 2015, disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2015.

Bogor, April 2014
Komisi Pemilihan Umum
Sekretaris,

Encep Moh. Ali Alhamidi, SH., MH.
NIP. 19610404 198203 1 004